

UPAYA LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP (LPPSLH) DALAM MENGADVOKASI ISU HIV/AIDS MELALUI PENDANAAN OLEH GLOBAL FUND DI PURWOKERTO

Ketrina Antonia Ecclesia¹, Bagus Subekti Nuswantoro², Diansari Solihah Amini³,
Yeyen Subandi^{4*}

^{1,2,3,4}Universitas Respati Yogyakarta
yeyensubandi@gmail.com*

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 26-10-2023

Accepted: 30-10-2023

Abstrak : *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meninggalkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Penularan HIV/AIDS melibatkan kontak seksual, penggunaan alat suntik terkontaminasi, dan penularan dari ibu ke janin. Tingkat HIV/AIDS di Kota Purwokerto, Jawa Tengah, tinggi terutama di kalangan LGBT, masalah yang belum efektif diatasi oleh pemerintah setempat. LPPSLH (Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup) berupaya mengatasi isu HIV/AIDS dengan dukungan dana dari organisasi *Global Fund*. Program ini menciptakan perubahan positif dalam perilaku kaum LGBT, seperti kesadaran akan pencegahan melalui penggunaan kondom dan perawatan kesehatan reproduksi. Pendampingan oleh LPPSLH juga meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS secara rutin tanpa rasa takut atau minder. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup komunitas yang terkena dampak.

Kata Kunci : LPPSLH, *Global Fund*, Kerjasama, HIV/AIDS, Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender)



PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, isu gender merupakan salah satu isu yang sedang diperbincangkan di masyarakat, baik bagi para akademisi, aktivis dan yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya dampak globalisasi, dimana setiap orang memiliki kebebasan berekspresi tanpa adanya batas (dalam menggunakan media sosial atau internet untuk menyuarakan orientasi seksual atau hanya sekedar membahas dan bertukar pikiran mengenai orientasi seksual yang ada di masyarakat). Hal ini kemudian membuat kita lebih terbuka mengenai pandangan – pandangan dan orientasi seksual yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Menurut survey CIA (*Centre Intelligence of Agency*) pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke- 5 terbesar (LGBT) setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk, 7,5 juta masyarakat Indonesia adalah LBGT, atau sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 diantaranya adalah LGBT. Di Indonesia, provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan presentase LGBT yang berjumlah 218.227 jiwa (0,0067%), dan 11.951 orang (0,55%) terindikasi HIV/AIDS.

Adanya fenomena orientasi seksual yang berbeda ini, kemudian menimbulkan perhatian dan respon di masyarakat yang dibagi menjadi dua golongan yaitu, golongan yang setuju dan golongan yang tidak setuju. Golongan masyarakat yang setuju, melihat kaum LGBT sebagai pribadi dengan pilihan seksual yang berbeda dari pada umumnya, hal ini perlu dihargai sebagai manusia yang bebas memilih dan memiliki hak - hak dan kewajiban yang sama seperti manusia lainnya. Terlepas dari orientasi seksualnya, kaum LGBT juga perlu dipandang setara dengan manusia pada umumnya dalam mendapatkan Hak-haknya sebagai Manusia. golongan masyarakat yang setuju dengan adanya kaum LGBT ini menyatakan, bahwa negara dan masyarakat perlu menghargai dan ikut mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara laki-laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual).

Masyarakat yang setuju dengan keberadaan kaum LGBT ini, kemudian menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar pandangan dan tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah pilihan mereka dan harus dihargai sebagai hak asasi manusia bagi mereka (kaum LGBT). Berbeda dengan kelompok masyarakat sebelumnya, golongan masyarakat yang tidak setuju ini, beranggapan bahwa orientasi seksual kaum LGBT ini merupakan penyimpangan atau kelainan sehingga negara sebagai entitas tertinggi dengan wewenang yang lebih, harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan fenomena LGBT yang dianggap sebagai sebuah wabah atau penyakit yang akan mempengaruhi generasi ke depan. Respon masyarakat Indonesia yang kurang setuju ini, dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang menganggap kaum LGBT ini, telah menyimpang dari norma – norma, moral, agama, budaya dan Pancasila sebagai pedoman atau ideologi bagi negara Indonesia. Masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan kaum LGBT yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, kemudian mengekspresikan bentuk protesnya melalui tindakan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, kaum LGBT menjadi kelompok yang termarginalkan. Selain menghadapi pertentangan dan diskriminasi dilingkungan masyarakat, kaum LGBT merupakan salah satu kelompok dengan tingkat pengidap HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Sehingga kelompok LGBT tidak hanya mendapatkan diskriminasi di kehidupan sosial, namun juga mendapatkan diskriminasi dalam lingkup kesehatan. Kemudian berdasarkan hal ini, isu kesehatan juga menjadi salah satu isu yang tidak dapat dipisahkan dari kaum LGBT. Isu kesehatan yang dialami kaum LGBT ini,

diantaranya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh perilaku seksual yaitu HIV/AIDS. Tidak dapat dipungkiri bahwa HIV/AIDS dan LGBT penyakit dengan presentase LGBT sebagai penyumbang yang cukup tinggi di Indonesia. Namun dengan adanya penolakan dalam bentuk diskriminasi oleh Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya perbedaan orientasi seksual kaum LGBT ini, yang kemudian membuat kaum LGBT menjadi termarginalkan dan tidak dapat memperoleh hak – haknya sebagai seorang warga negara, baik untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan yang utama adalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah merupakan salah satu kota dengan tingkat kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi. dengan presentase penyumbang terbesar terdapat pada kaum LGBT. Untuk menekan tingkat kasus HIV/AIDS di Purwokerto, pemerintah kabupaten sendiri belum mampu untuk menanggulangi masalah yang dialami oleh kaum LGBT. khususnya dalam pelayanan kesehatan bagi kaum LGBT. Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian LPPSLH (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup) sebagai sebuah organisasi Non-Pemerintah atau NGO yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dengan salah satu program yaitu perkotaan dan kependudukan. Program ini yang dilakukan dalam bentuk aktivitas pendampingan komunitas miskin, dan termarginalkan terutama kaum LGBT, pengidap HIV/AIDS dan penganut agama minoritas (penghayat), serta memberi fasilitas pengembangan infrastruktur dasar terhadap komunitas miskin kota. Keyakinan yang dimiliki oleh LPPSLH tentang pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika masyarakat telah sadar dan mampu menyuarakan kondisinya serta memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Khususnya hak dalam mendapatkan layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan kesempatan untuk bekerja.

Dalam upaya menyelesaikan isu HIV/AIDS pada kelompok beresiko kaum LGBT, LPPSLH memulai kerjasama dengan Global Fund. Dimana, Global Fund merupakan sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dalam penyaluran dana di bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan dan mengelola sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS, TB (Tuberkulosis) dan Malaria (ATM). Tujuan utama Global Fund untuk mengurangi angka penyebaran infeksi dan juga mencegah angka kematian pada ketiga penyakit tersebut. Secara spesifik kerjasama ini dilakukan dengan dengan program utamanya adalah penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok yang beresiko tinggi (Kaum LGBT) dan mendukung penuh hak – hak kaum LGBT terkhususnya dalam pelayanan kesehatan di Purwokerto. untuk mendapatkan akses yang sama dengan warga negara Indonesia, terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, yang didasari oleh pandangan HAM Universal dengan prinsip kebebasan dan persamaan. Maka dari itu, laporan magang ini disusun dengan tujuan mengkaji peran LPPSLH (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup) melalui pendanaan dari Global Found untuk megadvokasi kaum LGBT dalam pelayanan kesehatan di Purwokerto, dengan menggunakan pendekatan HAM Universal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak LPPSLH (Lembaga Penelitian, Pengembangan Sumber daya Lingkungan Hidup), selain itu penulis juga melakukan study literatur dengan melakukan pengumpulan bahan literatur, observasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan Konsep transnasionalisme dan teori bantuan luar negeri dalam menganalisa fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus (HIV). Virus ini menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh, jika hal tersebut terjadi maka tubuh akan rentan terhadap penyakit tubuh yang lemah dan tidak berdaya menyebabkan berkembangnya kuman penyakit. HIV/AIDS menular melalui kontak seksual yaitu terdapat pada cairan sperma dan cairan vagina, alat suntik yang terkontaminasi seperti penggunaan narkoba suntik, dan juga penularan melalui ibu ke janin. Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan tahun 1987 dan sampai dengan Desember 2014, telah menyebar ke 407 (80%) dari 507 kabupaten atau kota di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan SIHA tahun 2019, kelompok berisiko, LSL (Lelaki Seks Lelaki) menempati peringkat ketiga untuk persentase HIV positif yang melakukan tes HIV, yaitu sebesar 8,75%. Peringkat kedua adalah pelanggan PS (Pekerja Seks) sebesar 10,57%, dan peringkat pertama adalah Sero Discordant (salah satu pasangan memiliki HIV, sementara yang lain tidak) sebesar 92,19%. Berikut adalah jumlah tes HIV dan HIV Positif menurut kelompok berisiko tahun 2019. Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berada di urutan ke-3 terbanyak kasus AIDS yaitu kasus HIV yang mencapai 6.531 kasus. Perincian kasus HIV di Jawa Tengah sebanyak 18.038 kasus, sedangkan kasus AIDS mencapai 6.531 kasus Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas berdasarkan data Profil Kesehatan. Dalam Peningkatan isu HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah kaum LGBT merupakan penyumbang tertinggi yaitu dengan jumlah 218.227 jiwa (0,0067%), dan 11.951 orang (0,55%) terindikasi HIV/AIDS.

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan sekelompok orang dengan orientasi seksual yang berbeda dari orientasi seksual pada umumnya. Maraknya isu gerakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, dimulai pada awal tahun 2016. Isu gender ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, sehingga memunculkan wacana perlunya suatu pengaturan mengenai LGBT. Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya (nilai – nilai hidup yang ada di masyarakat), agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender dan interaksi dengan individu LGBT. Tingkat penolakan, dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada latar belakang budaya (nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat), agama, kelompok sosial, media, keluarga dan lingkungan. Dalam melihat fenomena LGBT, masyarakat Indonesia di bagi menjadi kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Sebagaimana masyarakat kontra, Indonesia melihat kaum LGBT sebagai penyimpangan pada orientasi seksual seksual, sedangkan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang pro berpendapat bahwa, perbedaan orientasi seksual merupakan pilihan sebagai seorang individu yang bebas memilih dan memiliki hak asasi manusia, sehingga perlu untuk dihargai.

Pada tahun 2016 LGBT membuka diri dan menuntut persamaan hak dalam hal identitas yang diakui negara. Sebagaimana disampaikan oleh Forum LGBT + Intersex and Queer (LGBTIQ) pada tanggal 27 Januari 2016 yang isinya antara lain meminta penghapusan diskriminasi dan kekerasan pada kaum LGBT, meminta presiden dan DPR memberikan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan diskriminasi, dan meminta presiden agar serius untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi orang-orang LGBT. Tuntutan serupa disederhanakan oleh aktivis dan pelaku LGBT, Hartoyo, menjadi tiga yaitu “agar ada penghapusan diskriminasi seksual dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus”. Adanya penuntutan persamaan hak dalam hal identitas untuk diakui negara ini tentunya didasari oleh adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT di lingkungan masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan. Salah satu kendala yang dialami dalam pengendalian presentase isu

HIV/AIDS di Purwokerto adalah stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS (ODHA). Timbulnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA disebabkan oleh orientasi seksual para kaum LGBT yang dianggap penyimpang.

Meningkatnya isu HIV/AIDS dengan kategori penyumbang kaum LGBT di Kota Purwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini juga dilatar belakangi oleh perilaku seksual dan beberapa faktor penghambat yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah Kota Purwokerto yaitu:

1. Kondisi Sosial Budaya di Masyarakat

Dengan adanya pandangan masyarakat yang masih menolak keras adanya orientasi seksual yang berbeda, adanya stigma negatif di masyarakat mengenai LGBT dan HIV/AIDS yang ditimbulkan karena kurangnya edukasi membuat adanya penolakan oleh masyarakat yang kemudian membuat kelompok LGBT kemudian menutup diri akan orientasi seksual, identitas seksual dan pengkespresian gender, hal ini juga yang melatarbelakangi kaum LGBT dengan HIV/AIDS berani membuka dirinya untuk mencari jalan keluar dari penyakit yang diderita.

2. Kondisi Keluarga

Hidup sebagai kaum LGBT dengan orientasi yang dianggap menyimpang di masyarakat terutama di keluarga membuat para kaum LGBT sering kali mendapat penolakan bahkan diskriminasi di lingkungan keluarganya yang tidak dapat menerima orientasi seksualnya, hingga bagaimana jika pihak keluarga sendiri yang menganggap kaum LGBT sebagai sebuah penyimpangan mendapati kenyataan bahwa pihak keluarganya yang merupakan seorang LGBT juga terkena HIV/AIDS. hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor seorang dengan individu gas mau terbuka dengan penyakitnya kepada pihak keluarga.

3. Agama

Agama merupakan suatu prespektif yang kemudian mempengaruhi padangan masyarakat dalam melihat suatu fenomena, terutama fenomena LGBT di Indonesia. Ajaran agama di Indonesia ditafsirkan secara konservatif untuk menolak adanya perilaku seksual yang berbeda yang kemudian dianggap sebagai dosa dan dinggap sebagai sebuah penyakit yang perlu diobati. Peran agama yang cukup berpengaruh di kalangan masyarakat Indonesia ini yang kemudian memberikan bentuk diskriminasi terhadap kaum LGBT, sebagian besar kaum LGBT yang ada di lingkungan beragama pasi menerima penolakang di masyarakat hingga dalam lingkungan keuarga. Hal ini juga yang kemudian membuat kaum LGBT kesulitan untuk membuka diri di lingkungan masyarakat.

4. Minimnya Pendidikan Seks

Kurangnya pengetahuan serta informasi seputar kesehatan dan kesejaterahan di kalangan masyarakat dan kaum LGBT itu sendiri yang kemudian menimbulkan pertentangan yang membuat kaum LGBT dikucilkan sehingga membuat mereka termarjinalkan. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat HIV/AIDS pada kaum LGBT dikarenakan kurang terbuka dan menerima keadaan.

5. Masalah Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat berdampak bagi peningkatan kasus HIV/AIDS dengan penjumbang kaum LGBT. Hal ini disebabkan oleh kendala mendapatkan pekerjaan dikarenakan diskriminasi pada orientasi seksual, yang kemudian membuat kaum LGBT yang terinfeksi HIV/AIDS tidak mampu melakukan konseling,tes,pendampingan sebagai ODHA dan biaya pengobatan dengan mengkonsumsi ARV seumur hidup.

Dalam faktor – faktor yang dipaparkan diatas, biaya dan minimnya pengetahuan mengenai pendidikan seksualitas merupakan faktor terbesar yang penghambat

peningkatan isu HIV/AIDS dengan kategori penyumbang kaum LGBT di Kota Purwokerto. Global Fund merupakan sebuah organisasi Internasional non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan dan mengelola sumber daya untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS, TB (Tuberkolosis) dan Malaria (ATM). Tujuan utama dari Global Fund adalah untuk mengurangi angka penyebaran infeksi dan juga mencegah angka kematian pada ketiga penyakit tersebut. Dalam berperan sebagai sebuah organisasi yang mengelola dan menyalurkan sumber dana dan tambahan melalui kemitraan Publik - Swasta yang akan memberikan kontribusi yang berkesinambungan dan signifikan terhadap ketiga penyakit tersebut. Dalam Penyaluran dana Global Fund kepada pihak Lembaga Penelitian, Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup (LPPSLH). Pihak Global Fund menetapkan aturan model pendanaan berbasis kinerja. Pendanaan berbasis kinerja adalah pendanaan yang akan disetujui oleh Global Fund jika suatu organisasi telah memenuhi sistem penilaian. Sistem penilaian tersebut diantaranya (1) Ketepatan waktu dalam melaksanakan program hingga melakukan pelaporan.

Pelaksanaan program dibatasi dengan cara menggunakan sistem kuartal, yaitu tiga bulan sekali dan enam bulan sekali. Pada sistem kuartal itu, LPPSLH akan memberikan laporan rutin terkait pelaksanaan program dan juga laporan penggunaan dana bantuan kepada *Global Fund*; (2) Ketepatan pengelolaan program. Program TB yang dilaksanakan telah diatur oleh PR dan *Global Fund*. Selain berisi penetapan program TB, aturan tersebut juga mencakup kualitas tenaga kesehatan yang harus dilatih. Pelaksanaan program TB harus sesuai dengan pedoman yang telah disetujui, yaitu *Planning of Action* (POA); (3) Penggunaan dana bantuan dengan benar. Penggunaan dana untuk program TB harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan persetujuan antara PR dan *Global Fund*. Jika SR/SSR menggunakan biaya untuk hal-hal diluar ketentuan tersebut, pengeluaran tersebut dianggap tidak sah dan wajib dikembalikan kepada PR. Dalam sistem penilaian yang ditentukan *Global Fund*, pihak LPPSLH dapat dikatakan berhasil masuk dalam kriteria atau sistem penelian yang berikan hal ini terbukti dengan dilihat pada salah satu program LPPSLH yaitu, Program perkotaan dan kependudukan. Program perkotaan dan kependudukan merupakan program kedua LPPSLH yang dilakukan dalam bentuk aktivitas pendampingan komunitas miskin serta memberi fasilitas pengembangan infrastruktur dasar terhadap komunitas miskin kota. Keyakinan yang dimiliki oleh LPPSLH tentang pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika masyarakat telah sadar dan mampu menyuarakan kondisinya serta memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Khususnya hak dalam mendapatkan layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan kesempatan untuk bekerja. Dalam program kerja ini LPPSLH juga aktif dalam kegiatan pennggulangan HIV/AIDS, program kerja ini aktif dijalankan pada tahun 2006 dengan bekerjasama dengan *Family Health International* pada tahun 2006-2011 dan Dinas Kesehatan serta stakeholder wilayah terkait melalui program aksi stop AIDS dan dilanjutkan dengan kerjasama dengan PKBI jawa tengah dengan program *Global Fund* pada tahun 2012-2022. Dalam menjalankan program perkotaan dan kependudukan, terutama dalam mengadvokasi isu HIV/AIDS pada kelompok beresiko (LGBT), pihak LPPSLH memulai dengan pembuatan komunitas kaum LGBT, pendampingan lalu dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi, selain itu pihak LPPSLH juga bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam pengadaan obat - obatan dan pemeriksaan HIV/AIDS.

Tujuan model pendanaan berbasis kinerja adalah untuk mencapai suatu hasil secara akuntabilitas. Lebih lanjut, dalam menjalin kerjasama, pihak *Global Fund* dan organisasi terkait akan bertemu langsung untuk melakukan suatu perjanjian kontrak. Untuk menetapkan keputusan pendanaan, *Global Fund* mengharuskan pembuatan

Proposal dengan mencatumkan beberapa kriteria, diantaranya, pertama, berfokus pada program terbaik melalui dana bantuan. Program kesehatan penanggulangan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat menjangkau dan mengobati orang-orang yang terkena penyakit HIV AIDS, Malaria, dan TB. Kedua, membuat alokasi sumber daya. Dalam hal ini, setiap negara yang tergabung dalam kerjasama Global Fund harus memiliki komitmen untuk membangun sumber daya yang kuat, sebagai salah satu instrumen untuk kesuksesan program, TB. Ketiga, membangun, melengkapi, dan berkoordinasi dengan program regional dan nasional untuk mendukung kebijakan. Global Fund akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan masing-masing negara dan organisasi lainnya untuk menetapkan program apa saja yang akan diterapkan dalam menanggulangi penyakit AIDS, TB dan Malaria. Keempat, berfokus pada kinerja dengan menghubungkan sumber daya dengan pencapaian hasil yang jelas, terstruktur dan berkelanjutan. Kelima, Berfokus pada pengembangan dan perluasan kemitraan organisasi pemerintah/swasta/nonpemerintah. Dalam rangka menangani ketiga penyakit AIDS, TB dan Malaria (ATM), selain bekerja sama dengan Global Fund, setiap negara juga harus memperluas kerjasama dengan pihak lain, agar tercapainya target nasional masing-masing negara. keenam, Memperkuat partisipasi masyarakat, terutama mereka yang terinfeksi dan terkena dampak langsung dari tiga penyakit tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat terdampak penyakit tersebut memiliki keinginan untuk sembuh dan semangat untuk menjalankan pengobatan. Setelah dua proses yang diharuskan pihak Global Fund yaitu mulai dari sistem penilaian dan pembuatan proposal, pihak LPPSLH kemudian mendapatkan pendanaan.

Sistem pendanaan *Global Fund* akan melalui beberapa alur sebelum dana bantuan diterima oleh LPPSLH. *Global Fund* akan memberikan dana langsung kepada Principal Recipient (PR) untuk Indonesia, kemudian PR Indonesia akan mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada organisasi-organisasi lain yang dinamakan *Sub Recipient* (SR). SR adalah suatu bagian struktur dari PR yang telah bekerjasama untuk membantu dalam pelaksanaan program yang sedang dilakukan. Kemudian SR akan menyalurkan dana ke Sub SR (SSR). Setelah dana telah disalurkan, maka LPPSLH siap memainkan peran penting dalam mengelola dana bantuan yang akan diimplementasikan dalam program-program yang telah ditentukan.

Upaya Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH)

Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan hidup atau LPPSLH merupakan salah satu LSM lokal yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini dirintis sejak tahun 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan para intelektual di Purwokerto. Pembentukan LPPSLH dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat yang pada saat itu sangat prihatin dengan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Dengan adanya realitas yang terjadi saat itu, kemudian para aktivis dan intelektual ini kemudian membuat program pendampingan kepada masyarakat yang sudah tergabung dalam komunitas miskin, baik dikota maupun didesa. Sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO yang terbentuk karena fenomena yang terjadi dimasyarakat saat itu, orientasi kerja dari Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) ini banyak bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi dari LPPSLH.

LPPSLH memiliki dua program utama yang masing-masing memiliki peran dan tempat sesuai porsinya. Dua program utama tersebut adalah Program Perdesaan dan Kewirausahaan Sosial dan Program Perkotaan dan Kependudukan. Program Pedesaan dan Kewirausahaan merupakan program Sosial yang bertujuan untuk mengelola

kegiatan-kegiatan yang mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan, melalui pendampingan peningkatan kapasitas dan kewirausahaan. Selain itu, sejak berdirinya LPPSLH telah memberikan perhatian khusus kepada pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan (*community forestry*). Dalam perkembangannya LPPSLH selalu melakukan replikasi pengalaman dan juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai bentuk dorongan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan. Selain itu LPPSLH juga menggerakkan pertanian berkelanjutan yang merupakan salah satu pilar penting guna mewujudkan kedaulatan petani atas pangan. Program kedua yang dijalankan oleh LPPSLH adalah program perkotaan dan kependudukan. Program ini dijalankan oleh LPPSLH dalam bentuk aktivitas pendampingan komunitas miskin serta memberi fasilitas pengembangan infrastruktur dasar terhadap komunitas miskin kota. Keyakinan yang dimiliki oleh LPPSLH mengenai pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika masyarakat telah sadar dan mampu menyuarakan kondisinya serta memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Khususnya hal dalam mendapatkan layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan kesempatan untuk kerja.

Berbicara mengenai hak dalam layanan publik pihak LPPSLH juga berupaya dengan melakukan kerjasama ADB dan Bank Dunia melalui Departemen Pekerjaan Umum serta Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh komunitas miskin di perkotaan kerjasama ini dilakukan sejak 2000 – 2007. Selain itu, pada tahun 2006 LPPSLH juga aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV&AIDS yang bekerjasama dengan Family Health International dan Dinas Kesehatan serta stakeholder wilayah terkait melalui program /aksi stop AIDS dan dilanjutkan dengan kerjasama dengan PKBI Jawa Tengah dengan program Global Fund Round 8 (GFR8). Dalam layanan kesehatan LPPSLH juga aktif menyuarakan hak – hak warga negara. Terutama warga negara yang termarginalkan seperti kaum LGBT, hal ini dapat dilihat dengan adanya kerjasama pihak LPPSLH dengan organisasi internasional non pemerintahan yang bergerak dalam pendanaan penyakit HIV/AIDS, TB, dan Malaria (ATM) yaitu *Global Fund*. Kerjasama yang terjalin sejak Tahun 2012 hingga 2022 ini difokuskan pada penanggulangan isu HIV/AIDS terutama pada kelompok beresiko kaum LGBT. Penanggulangan isu HIV / AIDS dijalankan dengan pembuatan program “ Stop Aksi AIDS” dan didanai oleh pihak Global Fund. Dalam menjalankan program stop aksi AIDS ini, pihak LPPSLH mengadvokasi isu HIV/AIDS dengan spesifikasi pada kelompok beresiko yaitu kaum LGBT. Dengan dilatar belakangi oleh masalah – masalah diskriminasi yang dihadapi oleh kaum LGBT di lingkungan masyarakat terutama yang terdapat dalam dua faktor penghambat menurunnya isu HIV/AIDS dengan penyumbang kaum LGBT minimnya pengetahuan seksualitas dan masalah ekonomi yang mempersulit kaum LGBT khususnya di Purwokerto.

Isu HIV/AIDS dengan penyumbang tertinggi adalah kaum LGBT, merupakan fenomena sosial yang sangat sulit untuk diselesaikan. Adanya diskriminasi yang dilatar belakangi oleh perbedaan orientasi seksual terhadap kaum LGBT di masyarakat bahkan sampai ke pelayanan kesehatan membuat kaum LGBT menjadi kaum yang termarginalkan dan tidak mampu mengakses diri ke ruang – ruang publik (Layanan Kesehatan) hal ini juga tentunya makin mempersulit pemerintah untuk menekan tingkat HIV/ AIDS di Indonesia. Selain menjadi kaum yang termarginalkan karena diskriminasi terhadap orientasi seksual, kaum LGBT juga memiliki faktor terbesar yang menghambat penekanan isi HIV/AIDS dengan penyumbang kaum LGBT di kota Purwokerto, kabupaten Banyumas Jawa Tengah yaitu minimnya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan kaum LGBT untuk melakukan pemeriksaan VCT, pemberian obat per- enam bulan sampai dengan kontrol rutin ke rumah sakit. Dengan melihat adanya masalah yang dialami oleh kaum LGBT di kota Purwokerto kabupaten

Banjuman Jawa Tengah, LPPSLH sebagai sebuah lembaga lokal yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dan menyuarakan serta memperjuangkan hak masyarakat miskin sebagai warga negara. Khususnya hal dalam mendapatkan layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan kesempatan untuk kerja kemudian memulai kerjasama dengan pihak Global Fund yang merupakan sebuah organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan dan mengelola sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS, TB (Tuberkolosis) dan Malaria (ATM). Dengan tujuan utama *Global Fund* yaitu menarik, mengelola dan menyalurkan sumber dana tambahan melalui kemitraan publik-swasta yang akan memberikan kontribusi yang berkesinambungan dan signifikan terhadap ketiga penyakit tersebut. Dengan adanya pendanaan dari pihak Global Fund kepada pihak LPPSLH, kemudian pihak LPPSLH menjalankan tugasnya terutama dalam mengadvokasi isu HIV/AIDS di dalam program perkotaan dan kependudukan dengan mengadvokasi isu HIV/AIDS kaum LGBT dalam layanan kesehatan layanan kesehatan pada kelompok beresiko (kaum LGBT) dalam sebuah yaitu program stop aksi AIDS. Berikut akan penulis jelaskan peran LPPSLH untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum LGBT.

1. Pembuatan Komunitas Kaum LGBT

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengadvokasi isu HIV/AIDS pada kelompok beresiko (kaum LGBT) pihak LPPSLH memulai program stop aksi AIDS dengan pembauatan komunitas kaum LGBT, pembuatan komunitas ini bertujuan sebagai pencegahan dan pengendalian presentase isu HIV/AIDS dengan penyumbang kelompok beresiko (kaum LGBT). Pembuatan komunitas kaum LGBT ini dilakukan dengan tujuan dapat mempermudah pihak LPPSLH dalam pendataan, penyaluran obat-obatan dan pendampingan bagi kaum LGBT.

2. Edukasi dan Sosialisasi

Secara umum kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian kaum LGBT mengenai bahayanya penyakit HIV/AIDS, untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa optimas, menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS, untuk meningkatkan pemahaman dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), untuk menormalisasi isu HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, konsultasi seputar HIV/ AIDS dan untuk memahami pentingnya melakukan tes HIV dan pengobatan ARV bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) secara dini. Dari sosialisasi HIV/AIDS tersebut diharapkan kaum LGBT mempunyai pengetahuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat bagi sesama.

3. Pengadaan Obat dan Pemeriksaan

Dalam menjalankan program stop aksi AIDS terutama dalam pengadaan obat dan pemeriksaan HIV//AIDS, pihak LPPSLH juga bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan. Kerjasama ini bertujuan untuk menjadikan LPPSLH sebagai wadah bagi kaum LGBT dalam mendapatkan hak – haknya sebagai warga negara terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan adanya kerjasama pihak LPPSLH dengan dinas kesehatan, kemudian mempermudah pengadaan dan distribusi obat Anti Retroviral (ARV), dalam pengadaan obat –obatan dan pemeriksaan HIV/ AIDS, kedua belah pihak LPPSLH dan dinas kesehatan memutuskan untuk menjadwalkan pemeriksaan HIV/ AIDS setiap tiga bulan sekali yang dilakukan diwadahi oleh pihak LPPSLH.

4. Pendampingan Kaum LGBT

Sebagai seorang ODHA (orang Dengan HIV/AIDS). Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh. Hal ini dikarenakan ODHA akan dipandang negatif sehingga dijauhi atau dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya bahkan keluarganya. Terutama bagi seorang LGBT yang sering kali mendapatkan perilaku kurang baik karena orientasi seksualnya yang dianggap menyimpang. Seringkali dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga tidak didapatkan oleh ODHA. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan pihak LPPSLH terhadap kaum LGBT yang terkena HIV/AIDS menjadi sangat strategis dalam upaya mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan LPPSLH yaitu:

- a. Penguatan secara psikologis terhadap ODHA.
- b. Memberikan support untuk patuh terapi ART.
- c. Melakukan Home Dan Hospital Visit.
- d. Study Club, sebagai wadah untuk sharing pengalaman dan penambahan wawasan ODHA.

Analisis konsep Transnasionalisme

Khone dan Nye mendefinisikan Transnasional (Transnasional Relations) sebagai “The movement of tangible items across state boundaries when at least one actor is not an agent of government or an international organization” definisi tersebut memperlihatkan bagaimana signifikansi dimensi internasional dalam kajian hubungan internasional. Interaksi lintas batas yang melibatkan peran aktor non negara dalam aktivitas hubungan internasional merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung cukup lama dalam studi hubungan internasional, hal ini kemudian ditandai oleh aktor masyarakat sipil yang sudah sejak lama bergiat pada isu – isu yang melintasi batas negara yaitu sejak abad ke-19. Dalam Transnasionalisme gelombang ketiga, Keck dan Sikkink mengemukakan bahwa definisi aktor non negara yaitu kelompok advokasi yang menyuarakan isu – isu utama. Kelompok advokasi tersebut terdiri dari NGO, INGO, kalangan aktivis, media, organisasi keagamaan, diaspora, akademisi, gerakan sosial domestik yang memiliki cabang atau simpatisan beragam mulai dari tingkat lokal, nasional, regional atau pemerintahan atau cabang pemerintahan di luar negeri. Berdasarkan definisi diatas, Global Fund dapat digolongkan sebagai sebuah organisasi internasional yang didirikan dengan pola kerjasamanya melintasi batas-batas negara dengan visi -misi untuk dijalankan disuatu negara. Dalam hal ini *Global Found* sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam pengumpulan dan penyaluran dana untuk membiayai penyakit HIV, Malaria (TM), dan TB di Indonesia terkhususnya di kota Purwokerto, melalui LPPSLH (Lemabaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup) sebagai organisasi lokal yang bergerak dalam isu kemanusiaan untuk mewujudkan tujuan bersama terkhususnya dalam memerangi isu HIV/AIDS. Penggunaan prespektif Transnasionalisme dalam penulisan laporan magang ini adalah untuk menganalisis peran Global Fund sebagai sebuah organisasi Internasional yang membiayai pihak LPPSLH dalam menjalankan program stop aksi AIDS.

Analisis Teori Bantuan Luar Negeri

Menurut Robert Gilpin dalam bukunya “The Political Economy of International Relations” yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif lebih maju kepada negara yang lebih miskin secara ekonomi. Sedangkan secara luas, K.J. Holsti dalam bukunya “International Politics: Framework of Analysis” mengartikan bantuan luar negeri sebagai tranfer uang, teknologi, ataupun nasehat – nasehat dari negara donor ke negara penerima. Secara historis, kebanyakan

bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Pendorong dalam hal ini adalah negara maupun organisasi internasional dan penerima dalam hal ini adalah negara- negara yang menerima bantuan. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor. Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan (*interest*) negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri.

Secara historis, kebanyakan bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Pendorong dalam hal ini adalah negara maupun organisasi internasional dan penerima dalam hal ini adalah negara- negara yang menerima bantuan. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor. Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan (*interest*) negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri. Berdasarkan penggunaan teori bantuan luar negeri dalam penulisan laporan magang ini dapat disimpulkan bahwa, bantuan berupa pendanaan dari *Global Fund* sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menarik, menyalurkan dan mengelola sumber daya untuk memerangi HIV/AIDS, TB (Tuberkulosis) dan Malaria (ATM). Tujuan utama *Global Fund* untuk mengurangi angka penyebaran infeksi dan juga mencegah angka kematian pada ketiga penyakit tersebut. *Global Fund* berperan untuk menarik, mengelola dan menyalurkan sumber dana tambahan melalui kemitraan publik-swasta yang akan memberikan kontribusi yang berkesinambungan dan signifikan terhadap ketiga penyakit tersebut. Penyaluran dana atau bantuan Kepada LPPSLH merupakan perpindahan bantuan atau dana dari sang pendonor yakni *Global Fund* kepada penerima yaitu LPPSLH secara sukarela dengan tujuan bahwa pendanaan yang dilakukan dapat disalurkan sebagai pendukung isu kemanusiaan yang kemudian direalisasikan oleh LPPSLH dalam program “STOP AKSI AIDS” dapat membantu mengurangi presentase isu HIV/AIDS dengan studi kasus kelompok beresiko kaum LGBT, di Indonesia terkhususnya di kota Purwokerto, Jawa Tengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Virus ini menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh, jika hal tersebut terjadi maka tubuh akan rentan terhadap penyakit tubuh yang lemah dan tidak berdaya menyebabkan berkembangnya kuman penyakit. HIV/AIDS menular melalui kontak seksual yaitu terdapat pada cairan sperma dan cairan vagina, alat suntik yang terkontaminasi seperti penggunaan narkoba suntik, dan juga penularan melalui ibu ke janin. Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan tahun 1987 dan sampai dengan Desember 2014, telah menyebar ke 407 (80%) dari 507 kabupaten atau kota di seluruh provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berada di urutan ke-3 terbanyak kasus AIDS yaitu kasus HIV yang mencapai 6.531 kasus. Perincian kasus HIV di Jawa Tengah sebanyak 18.038 kasus, sedangkan kasus AIDS mencapai 6.531 kasus Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas berdasarkan data Profil Kesehatan. Dalam Peningkatan isu HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah kaum LGBT merupakan penyumbang tertinggi yaitu dengan jumlah 218.227 jiwa (0,0067%), dan 11.951 orang (0,55%) terindikasi HIV/AIDS.

Peningkatan presentase isu HIV/AIDS dengan penyumbang Kaum LGBT (Lesbian, bay, biseksual, Transgender) ini merupakan dampak dari minimnya pengetahuan seputar

kesehatan reproduksi dan bahanya penyakit HIV/AIDS selain itu sebagai kelompok yang termarginalkan di masyarakat, kaum LGBT juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dikarenakan orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Dengan melihat isu ini pihak LPPSLH dan Global Fund bekerjasama untuk menekan tingkat HIV/AIDS. Melalui pendanaan dari Global Fund, pihak LPPSLH membuat program aksi stop AIDS dengan fokus pada kelompok LGBT di Purwokerto. Dengan adanya program dari LPPSLH ini kemudian berdampak cukup baik bagi kelompok LGBT hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku dimana, adanya perubahan perilaku pada kelompok beresiko LGBT, hal ini ditandai dengan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan HIV/AIDS (penggunaan kondom) dan kesehatan reproduksi selain itu dengan adanya pendampingan dari pihak LPPSLH ini juga menimbulkan kesadaran bagi kelompok LGBT untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS secara rutin tanpa adanya rasa takut atau minder.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada pihak LPPSLH (Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup) yang selalu berupaya mengadvokasi masyarakat, dalam mendapatkan hak – haknya sebagai warga negara. Terkhususnya dalam upaya mengadvokasi isu HIV/AIDS melalui pendanaan oleh *Global Fund* di Purwokerto pada kelompok beresiko kaum LGBT. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta, terutama bagi dosen pembimbing dan penguji yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Akhir kata penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Jurnal yang sudah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Association, American Psychological. "Sexual Orientation and Gender Diversity," n.d. <https://www.apa.org/topics/lgbtq>.
- Atik Aryani, Widiyono, Ari Anitasari. "GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV/AIDS." Program studi Keperawatan, Universitas Sahid Surakarta (n.d.)
- Bernard. "Rivers, Donors to the Global Fund: Who Gives How Much?", Aidspan, diakses <http://www.aidspace.org/sites/default/files/publications/Aidspace%20report%20on%20donors%200.pdf>
- DPR RI. "Komisi VIII Dapat Aspirasi Usulan RUU Anti LGBT". 2016. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/13017>.
- Elga Andina. (FAKTOR PSIKOSOSIAL DALAM INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN GERAKAN LGBT DI INDONESIA Psychosocial Factors Interacting With LGBT Movement in Indonesia)2016 "LGBT Berhak Layanan Kesehatan Jiwa", <http://dev.republika.co.id>
- Hadiyani, Wuri Ratna. INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): EPIDEMIOLOGI DAN PENGETAHUAN SISWA SMA. Purwokerto: CV. PENA PERSADA, 2020.
- Humas sardjito(HIV AIDS:hindari penyakitnya bukan orangnya) 23, Juli 2019. (diakses melalui <https://sardjito.co.id/2019/07/23/hiv-aids-hindari-penyakitnya-bukan-orangnya/> pada 15, Januari 2023).
- Immanuel, Riordan. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran-babII. Skripsi. Unikom. Diakses melalui https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1923/8/Unikom_Riordan%20Immanuel%20Siregar_44310012_BAB%20II.pdf pada 16, Januari 2023.

- Kementrian Kesehatan RI (infodatin pusat data dan info kementrian kesehatan RI) 2019. (diakses pada 15, Januari 2023)
- K.J Holsti. 1983. "Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Terjemahan M. Tahir Azhari" Jakarta: Erlangga, hlm: 209-214. Diakses pada, 16 Januari 2023.
- Mark R Amstutz. 1995. "International Conflict and Cooperation, Amerika: Brown Communications. Inc", hlm: 74-75. Diakses pada, 16 Januari 2023.
- Oetari Cinthya Bramanty, 2012, Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Tuberkulosis Berbasis Komunitas Yang Dilakukan Oleh PR 'Aisyiyah, Tesis, EJakarta: Universitas Indonesia, hal. 94, diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300487>.
- Our Tim. Diakses : <http://www.lppslh.or.id/about/our-team/>
- Ramadona. Witanto, 2010, Peranan The Global Fund dalam Penanggulangan Penyakit TB di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 2007-2009, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia, hal.86, diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-ramadonawi-22709-4-babivp-f.pdf> pada 11 januari 2022
- Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiali – Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) Terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali. Diakses pada, 16 Januari 2023.
- RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN TANGERANG, 2015.
- Tengku Raka "Disinformasi yang Menjadi Diskriminasi : Permasalahan HIV di Indonesia" Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, september 2020). Diakses 2 Desember 2022
- Wulan, R.M., & Muktiali, M. (2013). Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali . Jurnal Wilayah dan Lingkungan, I(2), hal.157-174. Diakses melalui: <https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.157-174>